



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir **30 Juni 2024**
BAGIAN ANGGARAN 005.04

PENGADILAN TINGGI AGAMA **JAKARTA**

Jln. Radin Inten II No. 3 Duren Sawit
Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440

Telp. 86902313 Fax. 86902314

email : keuanganptjakarta2013@gmail.com

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 24 Juli 2024



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Nasrulloh



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Pernyataan Tanggung Jawab | iv |
| Ringkasan Laporan | v |
| I Laporan Realisasi Anggaran | 9 |
| II Neraca | 10 |
| III Laporan Operasional | 12 |
| IV Laporan Perubahan Ekuitas | 13 |
| V Catatan Atas Laporan Keuangan | |
| A. Penjelasan Umum | 14 |
| A.1 Profil dan Dasar Hukum | |
| A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan | |
| A.3 Basis Akuntansi | |
| A.4 Dasar Pengukuran | |
| A.5 Kebijakan Akuntansi | |
| B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran | 20 |
| B.1 Pendapatan | |
| B.1.1 Penerimaan Pajak | |
| B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak | |
| B.2 Belanja | |
| B.2.1 Belanja Pegawai | |
| B.2.2 Belanja Barang | |
| B.2.3 Belanja Modal | |
| B.2.4 Belanja Bantuan Sosial | |
| B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran | |
| B.2.5.1 Capaian Output | |
| C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca | 26 |
| C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran | |
| C.2 Kas di Bendahara Penerimaan | |
| C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas | |
| C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid) | |
| C.5 Uang Muka Belanja (prepayment) | |
| C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima | |
| C.7 Piutang Bukan Pajak | |
| C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan | |
| C.9 Piutang Bukan Pajak | |
| C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | |
| C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | |
| C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | |

- C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.15 Persediaan
- C.16 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
- C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran
- C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya
- C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang
- C.21 Properti Investasi
- C.22 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi
- C.23 Tanah
- C.24 Tanah Belum Diregister
- C.25 Peralatan dan Mesin
- C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
- C.27 Gedung dan Bangunan
- C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
- C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan
- C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister
- C.31 Aset Tetap Lainnya
- C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister
- C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan
- C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
- C.35 Aset Konsesi Jasa
- C.36 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
- C.37 Aset Tak Berwujud
- C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan
- C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan
- C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
- C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri
- C.42 Aset Lain-lain
- C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister
- C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
- C.45 Utang kepada Pihak Ketiga
- C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan
- C.47 Hibah Yang Belum Disahkan
- C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
- C.49 Pendapatan Diterima Dimuka
- C.50 Uang Muka dari KPPN
- C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya
- C.52 Kewajiban Konsesi Jasa
- C.53 Ekuitas
- C.54 Catatan Penting Lainnya neraca
- D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- D.1 Pendapatan Perpajakan
- D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak
- D.3 Beban Pegawai
- D.4 Beban Persediaan
- D.5 Beban Barang dan Jasa
- D.6 Beban Pemeliharaan
- D.7 Beban Perjalanan Dinas
- D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
- D.9 Beban Bantuan Sosial
- D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi
- D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar
- D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
- D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
- D.15 Pos Luar Biasa
- D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19
- D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

| | | |
|-----|---|----|
| E. | Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas | 44 |
| E.1 | Ekuitas Awal | |
| E.2 | Surplus (Defisit) LO | |
| E.3 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | |
| E.4 | Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas | |
| E.5 | Transaksi Antar Entitas | |
| E.6 | Ekuitas Akhir | |
| E.7 | Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas | |
| F. | Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas | 47 |
| VI. | Lampiran-Lampiran | 48 |

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 24 Juli 2024



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Nasrulloh



RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp760.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp760.000 atau mencapai 33,78 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp2.250.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp72.957.000 atau mencapai 54,04 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp135.015.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp11.600.000 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp11.600.000; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp11.600.000 dan Rp0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp760.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp72.957.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-72.197.000, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-72.197.000.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-72.197.000 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 72.197.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

DAFTAR TABEL

- 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
- 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023
- 3 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023
- 4 Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023
- 5 Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023
- 6 Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023
- 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024
- 8 Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023
- 9 Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023
- 10 Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023
- 11 Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2024 dan 2023
- 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2024 dan 2023
- 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2024 dan 2023
- 14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2024 dan 2023
- 15 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023
- 16 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------|-----|-----------------------------------|
| LAMPIRAN | I | Neraca Percobaan (Saldo Awal) |
| LAMPIRAN | II | Laporan Realisasi Anggaran (face) |
| LAMPIRAN | III | Neraca (face) |
| LAMPIRAN | IV | LO (face) |
| LAMPIRAN | V | LPE (face) |

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

| U R A I A N | Catatan | TA 2024 | | % thd Angg | TA 2023 |
|-------------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | | ANGGARAN | REALISASI | | REALISASI |
| PENDAPATAN DAN HIBAH | B.1 | | | | |
| Penerimaan Perpajakan | B.1.1 | - | - | - | - |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | B.1.2 | 2.250.000 | 760.000 | 33,78 | 850.000 |
| | | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 2.250.000 | 760.000 | 33,78 | 850.000 |
| | | | | | |
| BELANJA | B.2 | | | | |
| Belanja Pegawai | B.2.1 | - | - | - | - |
| Belanja Barang | B.2.2 | 135.015.000 | 72.957.000 | 54,04 | 87.449.000 |
| Belanja Modal | B.2.3 | - | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | B.2.4 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | 135.015.000 | 72.957.000 | 54,04 | 87.449.000 |
| | | | | | |

Jakarta, 24 Juli 2024



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Nasrulloh



NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

| U R A I A N | Catatan | 2024 | 2023 |
|---|---------|-------------------|----------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | C.1 | 11.000.000 | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan | C.2 | - | - |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | C.3 | 600.000 | - |
| Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) | C.4 | - | - |
| Uang Muka Belanja (prepayment) | C.5 | - | - |
| Pendapatan yang Masih Harus Diterima | C.6 | - | - |
| Piutang Perpajakan | C.7 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan | C.8 | - | - |
| Piutang Bukan Pajak | C.9 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak | C.10 | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | C.11 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | C.12 | - | - |
| Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.13 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.14 | - | - |
| Persediaan | C.15 | - | - |
| Persediaan yang Belum Diregister | C.16 | - | - |
| Jumlah Aset Lancar | | 11.600.000 | - |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi | C.17 | - | - |
| Piutang Tagihan Penjualan Angsuran | C.18 | - | - |
| Piutang Jangka Panjang lainnya | C.19 | - | - |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang | C.20 | - | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | - | - |
| PROPERTI INVESTASI | | | |
| Properti Investasi | C.21 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | C.22 | - | - |
| ASET TETAP | | | |
| Tanah | C.23 | - | - |
| Tanah Belum Diregister | C.24 | - | - |
| Peralatan dan Mesin | C.25 | - | - |
| Peralatan dan Mesin Belum Diregister | C.26 | - | - |
| Gedung dan Bangunan | C.27 | - | - |
| Gedung dan Bangunan Belum Diregister | C.28 | - | - |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | C.29 | - | - |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister | C.30 | - | - |
| Aset Tetap Lainnya | C.31 | - | - |
| Aset Tetap yang Belum Diregister | C.32 | - | - |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | C.33 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | C.34 | - | - |
| Aset Koneksi Jasa | C.35 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan Aset Koneksi Jasa | C.36 | - | - |
| Jumlah Aset Tetap | | - | - |
| ASET LAINNYA | | | |
| Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | C.37 | - | - |
| Aset Tak Berwujud | C.38 | - | - |
| Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan | C.39 | - | - |
| Dana Yang Dibatasi Penggunaannya | C.40 | - | - |
| Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri | C.41 | - | - |
| Aset Lain-lain | C.42 | - | - |
| Aset Lainnya yang Belum Diregister | C.43 | - | - |
| Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya | C.44 | - | - |
| Jumlah Aset Lainnya | | - | - |
| JUMLAH ASET | | 11.600.000 | - |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | C.45 | 600.000 | - |
| Utang Yang Belum Ditagihkan | C.46 | - | - |
| Hibah Yang Belum Disahkan | C.47 | - | - |
| Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan | C.48 | - | - |
| Pendapatan Diterima Dimuka | C.49 | - | - |

| | | | |
|--|------|-------------------|---|
| Uang Muka dari KPPN | C.50 | 11.000.000 | - |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | C.51 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 11.600.000 | - |
| Kewajiban Konsesi Jasa | C.52 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | 11.600.000 | - |
| EKUITAS | | | |
| Ekuitas | C.53 | - | - |
| JUMLAH EKUITAS | | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 11.600.000 | - |

Jakarta, 24 Juli 2024



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Nasrulloh



LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Catatan | 2024 | 2023 |
|---|---------|---------------------|---------------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | |
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan Perpajakan | D.1 | - | - |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak | D.2 | 760.000 | 850.000 |
| Jumlah Pendapatan | | 760.000 | 850.000 |
| BEBAN | | | |
| BEBAN OPERASIONAL | | | |
| Beban Pegawai | D.3 | - | - |
| Beban Persediaan | D.4 | - | - |
| Beban Barang dan Jasa | D.5 | 11.407.000 | 7.028.000 |
| Beban Pemeliharaan | D.6 | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | D.7 | 61.550.000 | 84.360.000 |
| Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat | D.8 | - | - |
| Beban Bantuan Sosial | D.9 | - | - |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | D.10 | - | - |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | D.11 | - | - |
| Jumlah Beban | | 72.957.000 | 91.388.000 |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional | | (72.197.000) | (90.538.000) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | |
| Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar | D.12 | - | - |
| Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | D.13 | - | - |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | D.14 | - | - |
| Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional | | - | - |
| Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa | | (72.197.000) | (90.538.000) |
| Pos Luar Biasa | D.15 | | |
| Pendapatan PNBPN | | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | | - | - |
| Beban Persediaan | | - | - |
| - | | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | (72.197.000) | (90.538.000) |

Jakarta, 24 Juli 2024



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
Nasrulloh



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 DAN 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 2024 | 2023 |
|--|---------|--------------|--------------|
| EKUITAS AWAL | E.1 | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | E.2 | (72.197.000) | (90.538.000) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | E.3 | - | - |
| KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS | E.4 | - | - |
| Penyesuaian Nilai Aset | E.41 | - | - |
| Koreksi Nilai Persediaan | E.42 | - | - |
| Koreksi Atas Reklasifikasi | E.43 | - | - |
| Selisih Revaluasi Aset | E.44 | - | - |
| Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi | E.45 | - | - |
| Koreksi Lain-Lain | E.46 | - | - |
| Jumlah | | - | - |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | E.5 | 72.197.000 | 86.599.000 |
| KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS | | - | (3.939.000) |
| EKUITAS AKHIR | E.6 | - | (3.939.000) |
| | | | |

Jakarta, 24 Juli 2024



Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 Nasrulloh



A. PENJELASAN UMUM

A.1 PROFIL

Profil

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal.

Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153.

Setelah pendirian lembaga peradilan agama seperti diatur dalam dua Staatsblad di atas, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kewenangan absolut peradilan agama dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 meliputi: nikah, talak, rujuk, mahar dan tuntutan nafkah. Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura dibentuk pada tanggal 7 Maret 1938 bertepatan tanggal 5 Muharam 1357H berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 bertempat di Gedung Cikini No. 8, Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta, pada tanggal 1 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta dipindahkan ke Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946.

Dalam tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IJSD tanggal 3 Januari 1946 Tentang Pembentukan Kementerian Agama RI. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan dua Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Wilayah Bandung dan Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta dan untuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Jawa Timur dan Madura. Kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Nomenklatur Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Adapun nomenklatur peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli 1985 Pengadilan Tinggi Agama Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta. Keputusan itu baru dapat dilaksanakan dan diresmikan dengan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, bersamaan dengan dilantikannya, Drs. H. M. Taufik sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang berkantor di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat.

Kemudian pada akhir tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik pemerintah daerah DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2022 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

A. 2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. 4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|------------------|---|------------|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. | 100% |
| | 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN | |

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

| Kelompok Aset Tetap | Masa Manfaat |
|--|---------------------|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 Tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 Tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d. 40 Tahun |
| Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

| Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud | Masa Manfaat (Tahun) |
|--|-----------------------------|
| <i>Software</i> Komputer | 4 |
| <i>Franchise</i> | 5 |
| Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu | 10 |
| Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim. | 20 |
| Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan | 25 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram | 50 |
| Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I | 70 |

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal namun dalam hal Rencana Penarikan Dana saja, tidak merubah nilai DIPA. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

| Uraian | 2024 | Anggaran Setelah Revisi |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Pendapatan | | |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Jumlah Pendapatan | 2.250.000 | 2.250.000 |
| Belanja | | |
| Belanja Pegawai | - | - |
| Belanja Barang | 135.015.000 | 135.015.000 |
| Belanja Modal | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - |
| Jumlah Belanja | 135.015.000 | 135.015.000 |

Realisasi B.1 Pendapatan

Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024% adalah sebesar Rp760.000 atau mencapai 33,7 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.250.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp760.000. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak disebabkan oleh perbedaan jumlah perkara yang diterima semester 1 tahun anggaran 2024 dengan semester 1 tahun anggaran 2023. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

| Uraian | 2024 | | % |
|-------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | |
| Penerimaan Pajak | - | - | - |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 2.250.000 | 760.000 | 33,78 |
| Jumlah | 2.250.000 | 760.000 | 33,78 |

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 10,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Penerimaan Pajak | - | - | - |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak | 760.000 | 850.000 | (10,59) |
| Jumlah | 760.000 | 850.000 | (10,59) |

Realisasi B.1.1 Penerimaan Pajak

Penerimaan Pajak Rp0

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2024 sebesar 0,00 dari TA 2023 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|------------------|---------------------|---------------------|----------|
| Penerimaan Pajak | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Pendapatan Pajak Penghasilan | - | - | - |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai | - | - | - |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |
| Pengembalian Pendapatan | - | - | - |
| Pendapatan Pajak/Bea Cukai | - | - | - |

Realisasi B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp760.000 dan Rp850.000. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar 10,59 persen dari TA 2023. Perbedaan setoran PNPB disebabkan oleh berbedanya jumlah perkara banding pada semester I TA 2024 dengan jumlah perkara banding pada semester I TA 2023 Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------|
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 760.000 | 850.000 | (10,59) |
| Jumlah | 760.000 | 850.000 | (10,59) |

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (biaya proses) | 760.000 | 850.000 | (10,59) |
| | - | - | - |
| Jumlah | 760.000 | 850.000 | (10,59) |

Realisasi B.2 Belanja

Belanja Rp72.957.000

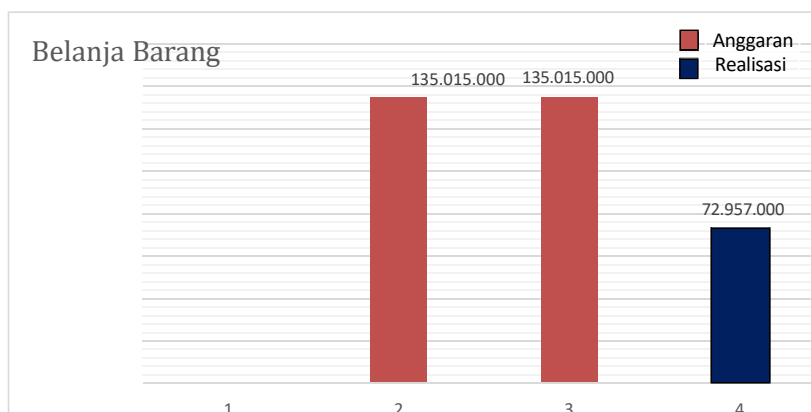
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp72.957.000 atau 54,04 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.135.015.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2024

| URAIAN | Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 | | |
|------------------------|--|-------------------|--------------|
| | Anggaran | Realisasi | % thdp Angg. |
| Belanja Pegawai | - | - | - |
| Belanja Barang | 135.015.000 | 72.957.000 | 54,04 |
| Belanja Modal | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | 135.015.000 | 72.957.000 | 54,04 |

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 16,57%. Penurunan realisasi pada semester 1 tahun anggaran 2024 disebabkan oleh Rencana Penarikan Dana yang telah disesuaikan dengan rencana kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023

Perbandingan Realisasi Belanja Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Belanja Pegawai | - | - | - |
| Belanja Barang | 72.957.000 | 87.449.000 | (16,57) |
| Belanja Modal | - | - | - |
| Belanja Bantuan Sosial | - | - | - |
| Jumlah | 72.957.000 | 87.449.000 | (16,57) |

Realisasi

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp0

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar 0,00 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Tidak ada pagu

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Jumlah Belanja kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja Pegawai | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

Realisasi

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp72.957.000 dan Rp87.449.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 16,57% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan belanja barang disebabkan oleh Rencana Penarikan Belanja yang telah disesuaikan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Belanja Barang Operasional | - | - | - |
| Belanja Barang Non Operasional | 11.407.000 | 4.439.000 | 156,97 |
| Belanja Barang Persediaan Barang | - | - | - |
| Belanja Jasa | - | 1.800.000 | (100,00) |
| Belanja Pemeliharaan | - | - | - |
| Belanja Perjalanan Dalam Negeri | 61.550.000 | 81.210.000 | (24,21) |
| Belanja Perjalanan Luar Negeri | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | 72.957.000 | 87.449.000 | (16,57) |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | 72.957.000 | 87.449.000 | (16,57) |

*Realisasi
Belanja
Modal Rp0*

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh Tidak ada pagu belanja modal pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Belanja Modal Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---|---------------------|---------------------|----------|
| Belanja Modal Tanah | - | - | - |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | - | - |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |
| Belanja Modal Lainnya | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

*Realisasi
Belanja
Modal
Tanah
Rp0*

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada pagu belanja modal pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--|---------------------|---------------------|----------|
| Belanja Modal Tanah | - | - | - |
| Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah | - | - | - |
| | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

Realisasi
Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp0

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Tidak ada pagu belanja modal pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

Realisasi
Belanja
Modal
Gedung
dan
Bangunan
Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak ada pagu belanja modal pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| Belanja Penambahan Nilai Gedung dan | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

Realisasi
Belanja
Modal,
Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Rp0

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Tidak ada pagu belanja modal pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---|
| Belanja Modal Jaringan | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

Realisasi
Belanja
Modal
Lainnya
Rp0

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan Tidak ada pagu belanja modal pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--|---------------------|---------------------|---|
| Belanja Modal Lainnya | - | - | - |
| Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau | - | - | - |
| | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2023. Belanja Bantuan Sosial Tidak ada pagu belanja covid pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BELANJA | REALISASI T.A. 2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---|---------------------|---------------------|---|
| Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Jumlah Belanja Kotor | - | - | - |
| Pengembalian Belanja | - | - | - |
| Jumlah Belanja | - | - | - |

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

B. 2.5.1 Capaian Output

Capaian Output

| Nama Satuan Kerja | Kode | Belanja | | | | Keluaran | | | | Keterangan |
|---------------------------------|----------|--|------------|------------|----|----------|-----------|----------|-----|---|
| | | Kegiatan | Anggaran | Realisasi | % | Target | Realisasi | Satuan | % | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Pengadilan Tinggi Agama Jakarta | 1053.AEA | Peningkatan dan Pemantauan Layanan Pengadilan | 85.015.000 | 27.567.000 | 32 | 6 | 3 | Kegiatan | 50 | Terisa 3 output yang akan diselesaikan di semester II |
| | | Sosialisasi/Bimtek Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Elektronik | 50.000.000 | 45.390.000 | 91 | 40 | 40 | Orang | 100 | Telah memenuhi target |

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp11.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.11.000.000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester I TA 2024 dan 2023

| Keterangan | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|-----------------|-------------------|------------|
| Uang Persediaan | 11.000.000 | - |
| Jumlah | 11.000.000 | - |

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Uang kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Uang Persediaan

Kas di

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Bendahara
Penerimaan
Rp0

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester I TA 2024 dan 2023

| Keterangan | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|---------------|------------|------------|
| - | - | - |
| Jumlah | - | - |

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp600.000

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp600.000 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Semester I TA 2024 dan 2023

| Keterangan | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|-------------------|----------------|------------|
| Dana Pihak Ketiga | 600.000,00 | - |
| Jumlah | 600.000 | - |

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Dana Pihak Ketiga pada rekening pengelolaan perkara banding

Belanja Dibayar

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Dimuka
(prepaid) Rp0

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester I TA 2024 dan 2023

| Keterangan | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|--|------------|------------|
| Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid) | - | - |
| Jumlah | - | - |

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

tidak ada belanja yang dibayar dimuka

Uang Muka

C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)

Belanja (prepayment) Rp0

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) adalah sebagai berikut :

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester I TA 2024 dan 2023

Table with 3 columns: Keterangan, TAHUN 2024, TAHUN 2023. Row 1: Jumlah, -

Penjelasan tentang Uang Muka Belanja : tidak ada belanja yang dibayarkan uang mukanya terlebih dahulu

Pendapatan

C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih Harus Diterima Rp0

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester I TA 2024 dan 2023

Table with 3 columns: Keterangan, TAHUN 2024, TAHUN 2023. Row 1: Jumlah, -

Penjelasan tentang Pendapatan yang Masih Harus Diterima : tidak ada pendapatan yang masih harus diterima

Piutang

C.7 Piutang Perpajakan

Perpajakan Rp0

Nilai Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Perpajakan merupakan piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak pusat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Rincian Piutang Perpajakan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

Table with 3 columns: Jenis Piutang, REALISASI T.A.2024, REALISASI T.A. 2023. Row 1: Jumlah, -

Penyisihan

C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Piutang Tidak Tertagih - Piutang

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak . Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

Table with 4 columns: Kualitas Piutang, Nilai Piutang Pajak, % penyisihan, Nilai Penyisihan. Rows include Lancar (0,5%), Kurang Lancar (10%), Diragukan (50%), Macet (100%), and Jumlah.

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

| Jenis Piutang | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Piutang Lainnya | - | - |
| Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak | - | - |
| Kas di Bendahara Pengeluaran TUP | - | - |
| Jumlah | - | - |

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester I TA 2024

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jangka Pendek | % penyisihan | Nilai Penyisihan |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| Piutang Bukan Pajak | | | |
| Lancar | - | 0,5% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

| Jenis | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Jumlah | - | - |

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jangka Pendek | % penyisihan | Nilai Penyisihan |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| Bagian Lancar TPA | | | |
| Lancar | - | 0,5% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |

Bagian Lancar**C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi****Tagihan Tuntutan**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi Rp0

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

| Jenis | TAHUN 2024 | TAHUN 2023 |
|---------------|------------|------------|
| - | - | - |
| Jumlah | - | - |

Penyisihan Piutang Tidak**C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi****Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jangka Pendek | % penyisihan | Nilai Penyisihan |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| Bagian Lancar TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0.5% | - |
| Kurang Lancar | - | 10% | - |
| Diragukan | - | 50% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |

Persediaan Rp0**C.15 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

| Jenis | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Barang Konsumsi | - | - |
| Bahan untuk Pemeliharaan | - | - |
| Jumlah | - | - |

Persediaan tersebut di atas dalam tidak ada akun persediaan pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 30 Juni 2024. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

| No. | Nama Barang Persediaan | Jumlah Unit | Nilai Rupiah |
|-----|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | | | |
| | Jumlah | - | - |

Persediaan yang Belum Diregister C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester I TA 2024 dan 2023

| Debitur | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| - | - | - |
| Jumlah | - | - |

Piutang Tagihan C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester I TA 2024 dan 2023

| Debitur | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Jumlah | - | - |

Piutang Jangka C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

| U R A I A N | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| Piutang Jangka Panjang lainnya | - | - |
| Jumlah | - | - |

Penyisihan C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 30 Juni 2024 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester I TA 2024 dan 2023

| Kualitas Piutang | Nilai Piutang Jangka Panjang | % penyisihan | Nilai Penyisihan |
|---|------------------------------|--------------|------------------|
| Tagihan TP/TGR | | | |
| Lancar | - | 0% | - |
| Kurang Lancar | - | 0% | - |
| Diragukan | - | 0% | - |
| Macet | - | 100% | - |
| Jumlah | - | | - |
| Tagihan PA | | | |
| Lancar | - | - | - |
| Kurang Lancar | - | - | - |
| Diragukan | - | - | - |
| Macet | - | - | - |
| Jumlah | - | | - |
| Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih | - | | - |

Properti

C.21 Properti Investasi

Investasi Rp0

Nilai Properti Investasi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 30 Juni 2024 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Semester I TA 2024 dan 2023

| U R A I A N | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| | - | - |
| Jumlah | - | - |

Akumulasi

C.22 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Penyusutan Properti Investasi Rp0

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp0

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Tidak ada aset tanah pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah : | |
| Reklasifikasi Masuk | - |
| Mutasi kurang : | |
| Transfer Keluar | - |
| Saldo per 30 Juni 2024 | - |

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Semester I TA 2024

| No. | Luas | Lokasi | Nilai |
|---------------|------|--------|-------|
| 1 | - | - | - |
| Jumlah | | | - |

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada aset tanah pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Tanah Belum Diregister C.24 Tanah Belum Diregister

Diregister Rp0 Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin C.25 Peralatan dan Mesin

Mesin Rp0 Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Mutasi Kurang: | |
| Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - |
| Saldo per 30 Juni 2024 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024 | - |
| Nilai Buku per 30 Juni 2024 | - |

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a. Tidak ada aset peralatan dan mesin pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Tidak ada aset peralatan dan mesin pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin Belum Diregister C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Mesin Belum Diregister Rp0 Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan C.27 Gedung dan Bangunan

Bangunan Rp0 Saldo Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Pengembangan Nilai Aset | - |
| Koreksi Kesalahan input IP | - |
| Mutasi Kurang: | |
| Saldo per 30 Juni 2024 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024 | - |
| Nilai Buku per 30 Juni 2024 | - |

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Belum Diregister C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Bangunan Belum Diregister Rp0 Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| | - |
| Mutasi Kurang: | |
| | - |
| Saldo per | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. | - |
| Nilai Buku per | - |

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada aset jalan, irigasi dan jaraingan pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
-

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak ada aset jalan, irigasi dan jaraingan pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut Tidak ada aset fisik lainnya pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Reklasifikasi Masuk | - |
| | - |
| | - |
| Mutasi Kurang: | |
| | - |
| Saldo per 30 Juni 2024 | - |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024 | - |
| Nilai Buku per 30 Juni 2024 | - |

Mutasi tambah/kurang:

Tidak ada aset fisik lainnya pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp.0 dan Rp.0.

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Tidak ada KDP pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut : Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

| | |
|---|---|
| Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Perolehan/Penambahan KDP | - |
| Mutasi Kurang: | |
| Saldo per 30 Juni 2024 | - |

Akumulasi

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan
Aset Tetap Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester I Tahun 2024

| No. | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan | Nilai Buku |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 1 | Peralatan dan Mesin | - | - | - |
| 2 | Gedung dan Bangunan | - | - | - |
| 3 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | - | - | - |
| 4 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| Akumulasi Penyusutan | | - | - | - |

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Konsesi

C.35 Aset Konsesi Jasa

Jasa Rp0

Saldo Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disediakan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

| U R A I A N | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 |
|---------------|--------------------|---------------------|
| | - | - |
| Jumlah | - | - |

Kemitraan

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Dengan Pihak

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester I Tahun 2024

| No | U r a i a n | Jumlah |
|----|---------------|----------|
| - | | - |
| | Jumlah | - |

Aset Tak

C.38 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp0

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

| | |
|--|----------|
| Saldo Nilai per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Transfer Masuk | - |
| | - |
| Mutasi Kurang: | |
| Penghentiaan Aset Dari Penggunaan | - |
| | - |
| Saldo Nilai per 30 Juni 2024 | - |
| Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024 | - |
| Nilai Buku per 30 Juni 2024 | - |

Aset Tak**C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0 Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|---|
| Saldo Nilai Perolehan per | - |
| Mutasi tambah: | |
| | - |
| Mutasi Kurang: | |
| Saldo per | - |

Dana Yang**C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya****Dibatasi Penggunaannya Rp0**

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

| Uraian | T.A. 2024 | T.A. 2023 |
|---------------|------------------|------------------|
| Dana Lainnya | - | - |
| Total | - | - |

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

Dana Cadangan**C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri****Perwakilan RI di Luar Negeri Rp0**

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

| Uraian | T.A. 2024 | T.A. 2023 |
|---------------|------------------|------------------|
| | - | - |
| Total | - | - |

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

Aset Lain-lain**C.42 Aset Lain-lain****Rp0**

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Saldo per 1 Januari 2024 | - |
| Mutasi tambah: | |
| Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya | - |
| | - |
| Mutasi Kurang: | |
| | - |
| Saldo per 30 Juni 2024 | - |
| Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2024 | - |
| Nilai Buku per 30 Juni 2024 | - |

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

| | |
|---------------|---|
| - | - |
| - | - |
| Mutasi Kurang | |
| - | - |

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

| Aset Lainnya | Nilai Perolehan | Akum. Penyusutan/ Amortisasi | Nilai Buku |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|
| Aset Tak Berwujud | | | |
| Aset Tak Berwujud | - | - | - |
| Aset Lain-lain | - | - | - |
| Total | - | - | - |

Utang kepada Pihak Ketiga C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp600.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

| Uraian | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A.2023 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan | (600.000) | - |
| Total | (600.000) | - |

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

dana tersimpan di rekening bendahara penerimaan milik pencari keadilan yang telah menyetor biaya proses perkara

Utang Yang Belum Ditagihkan C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

| Uraian | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A.2023 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | - | - |
| Total | - | - |

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :
tidak ada utang yang belum ditagihkan

Hibah Yang
belum
disahkan

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

| Uraian | Jumlah |
|---------------|--------|
| | - |
| Jumlah | - |

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan
: Tidak ada hibah

Utang Kelebihan C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Pembayaran
Pendapatan
Rp0*

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

| Uraian | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A.2023 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | - | - |
| Total | - | - |

Pendapatan

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

*Diterima Dimuka
Rp0*

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

| Uraian | REALISASI T.A.2019 | REALISASI T.A.2023 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | - | - |
| Total | - | - |

*Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :
tidak ada pendapatan yang diterima dimuka*

Uang Muka dari

C.50 Uang Muka dari KPPN

KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.000.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah |
|-----------------|-------------------|
| Uang Persediaan | 11.000.000 |
| | - |
| Total | 11.000.000 |

*Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :
Uang Persediaan merupakan uang yang diberikan dari KPPN untuk kebutuhan sehari-hari kantor*

Utang Jangka

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

| Uraian | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A.2023 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| Total | - | - |

*Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :
tidak ada utang yang dimiliki PTA Jakarta*

Kewajiban

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

| Uraian | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A.2023 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| Total | - | - |

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

Tidak ada kewajiban konsesi jasa apapun

Ekuitas Rp0

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.54 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan Perpajakan

Perpajakan Rp0

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh Tidak ada pendapatan perpajakan pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | 2024 | 2023 | % |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Pendapatan Pajak Penghasilan | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Pendapatan

Negara Bukan

Pajak Rp760.000

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp760.000 dan Rp850.000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 10,59. Hal tersebut disebabkan oleh PNBP seluruhnya erasal dari jumlah biaya proses perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | 2024 | 2023 | % |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana | - | - | - |
| Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan | 760.000 | 850.000,00 | (10,59) |
| Jumlah | 760.000,00 | 850.000,00 | (10,59) |

Beban Pegawai

D.3 Beban Pegawai

Rp0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Tidak ada beban belanja pegawai pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--|--------------------|---------------------|----------|
| Beban Gaji Pokok PNS | - | - | - |
| Beban Pembulatan Gaji PNS | - | - | - |
| Beban Tunj. Suami/Istri PNS | - | - | - |
| Beban Tunj. Anak PNS | - | - | - |
| Beban Tunj. Struktural PNS | - | - | - |
| Beban Tunj. Fungsional PNS | - | - | - |
| Beban Tunj. PPh PNS | - | - | - |
| Beban Tunj. Beras PNS | - | - | - |
| Beban Uang Makan PNS | - | - | - |
| Beban Tunjangan Umum PNS | - | - | - |
| Beban Uang Lembur | - | - | - |
| Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Beban

Persediaan Rp0

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | - | - | - |
| Jumlah Beban Persediaan | - | - | - |

Beban Barang dan Jasa
Rp11.407.000

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.407.000 dan Rp7.028.000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 62,31 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Terdapat perbedaan rencana penarikan dana dari tahun sebelumnya dan meningkatnya pagu belanja.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Beban Bahan | 11.407.000 | 5.228.000 | 118,19 |
| Beban Jasa Profesi | - | 1.800.000 | (100,00) |
| Jumlah | 11.407.000 | 7.028.000,00 | 62,31 |

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Tidak ada beban pemeliharaan pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Beban Perjalanan Dinas
Rp61.550.000

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp61.550.000 dan Rp84.360.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 27,04 persen disebabkan oleh rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan dan monitoring kinerja satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta di TA 2023 dengan TA 2024. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2019 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---|----------------------|---------------------|----------------|
| Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota | 27.000.000 | 35.550.000 | (24,05) |
| Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota | 34.550.000 | 48.810.000 | (29,22) |
| Jumlah | 61.550.000,00 | 84.360.000 | (27,04) |

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh tidak ada beban barang yang diserahkan ke masyarakat pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2019 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---------------|--------------------|---------------------|---|
| | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar 0,00 disebabkan oleh tidak ada beban bansos pada dipa 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Rincian Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--|--------------------|---------------------|---|
| Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| Jumah Penyusutan | - | - | - |
| | - | - | - |
| Jumlah Amortisasi | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| Beban Penyisihan Piutang PNBPN | - | - | - |
| Beban Penyisihan Piutang Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--|--------------------|---------------------|---|
| Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Surplus (Defisit) Penyelesaian

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir

Kewajiban Jangka Panjang Rp0

pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I TA 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|---|--------------------|---------------------|---|
| Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu | - | - | - |
| Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi | - | - | - |
| Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Pos Luar Biasa

D.15 Pos Luar Biasa

Rp0

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester I 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|------------------------|--------------------|---------------------|---|
| Pendapatan PNPB | - | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :
tidak ada PNPB pada pos-pos luar biasa yang diterima PTA Jakarta

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Semester I 2024 dan 2023

| URAIAN JENIS BEBAN | REALISASI T.A.2024 | REALISASI T.A. 2023 | % |
|--|--------------------|---------------------|---|
| Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19 | - | - | - |
| Jumlah | - | - | - |

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 : tidak ada anggaran penanganan covid 19 setelah wabah covid 19 dianggap telah selesai

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,00

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00

Defisit LO
Rp.72.197.000,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.72.197.000,00 dan Rp.90.538.000,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan
Mendasar Rp.0,00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

| Jenis Persediaan | Nilai Koreksi |
|--------------------------|---------------|
| Koreksi Nilai Persediaan | - |
| Jumlah | - |

Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya. Tidak ada koreksi atas reklasifikasi atas persediaan atau aset

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi |
|---|---------------|
| Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya | - |
| Jumlah | - |

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari Tidak ada selisih revaluasi aset

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

| Jenis Aset | Nilai Koreksi |
|---------------------------|---------------|
| Ekuitas Transaksi Lainnya | - |
| Revaluasi Aset Tetap | - |
| | - |
| Jumlah | - |

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini tidak ada koreksi nilai aset non revaluasi

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2024

| Jenis Aset Tetap Non Revaluasi | Nilai Koreksi |
|--------------------------------|---------------|
| Koreksi Nilai Persediaan | - |
| | - |
| Jumlah | - |

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah tidak ada koreksi lainnya. Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

| Jenis Koreksi | Nilai Koreksi |
|-----------------|---------------|
| Koreksi Lainnya | - |
| | - |
| Jumlah | - |

Transaksi Antar Entitas Rp72.197.000

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.72.197.000 dan Rp.86.599.000. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2024

| Transaksi Antar Entitas | Nilai |
|--|-------------------|
| Ditagihkan ke Entitas Lain | 72.957.000 |
| Diterima dari Entitas Lain | (760.000) |
| Transfer Keluar | (92.352.000) |
| Transfer Masuk | 92.352.000 |
| Pengesahan Hibah Langsung | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - |
| | - |
| Jumlah | 72.197.000 |

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DKEL sebesar Rp 72.957.000, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 760.000

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp-92.352.000 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

| Jenis | Entitas Tujuan | Nilai |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Blanko akta cerai | Pengadilan Agama Jakarta Pusat | 7.072.000 |
| Blanko akta cerai | Pengadilan Agama Jakarta Utara | 6.240.000 |
| Jumlah | | 92.352.000 |

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp92.352.000 yang terdiri dari :

| Jenis | Entitas Asal | Nilai |
|-------------------|------------------------------|-------------------|
| Blanko akta cerai | Dirjen Badan Peradilan Agama | 92.352.000 |
| - | - | - |
| Jumlah | | 92.352.000 |

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| Pemberi Hibah | Bentuk Hibah | Nilai |
|--|--------------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| Total Pengesahan | | - |
| Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung | - | - |
| Jumlah | | - |

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir Rp0

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.-3.939.000,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 04

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : 0100

DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : 401113

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 26/07/2024 3:56 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akruai_satker_poc

| KODE TRN | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
|----------|-----------|-----------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEMESTERAN TA 2024

Kode dan Nama UAKPA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Kode dan Nama Eselon 1 : (005.04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

| Objek Penelaahan | | Kondisi LK | | Seharusnya |
|---|---|-------------|--------------|-------------------|
| <i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i> | | | | |
| <i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i> | | | | |
| KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN | | | | |
| | Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Pernyataan Tanggung Jawab | √ | | Ada |
| 2 | Face LRA, Neraca, LO dan LPE | √ | | Ada |
| 3 | Catatan atas Laporan Keuangan | √ | | Ada |
| | Laporan Keuangan Tambahan | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal | √ | | Ada |
| 2 | Neraca Percobaan AkruaI | √ | | Ada |
| 3 | Neraca Percobaan Kas | √ | | Ada |
| 4 | Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun | √ | | Ada |
| KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI | | | | |
| | Kesesuaian Saldo | Sama | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI | √ | | Sama |
| <i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i> | | | | |
| 2 | Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas | √ | | Sama |
| PENGECEKAN PADA MONSAKTI | | | | |
| | To Do List | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan | | √ | Tidak |
| 2 | Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat | √ | | Ya |
| 3 | Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| 4 | Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| 5 | Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, | | √ | Tidak |
| 6 | Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| 7 | Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| 8 | Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| 9 | Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, | | √ | Tidak |
| 10 | Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan | | √ | Tidak |
| 11 | Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| 12 | Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan | | √ | Tidak |
| <i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i> | | | | |
| | Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi) | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA? | | √ | Tidak |
| 2 | Adakah "TDK COA" yang BEDA? | | √ | Tidak |
| 3 | Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA? | | √ | Tidak |
| | a. Pagu/DIPA | | √ | Tidak |
| | b. Estimasi PNBPN | | √ | Tidak |
| | c. Belanja | | √ | Tidak |
| | d. Pengembangan Belanja | | √ | Tidak |
| | e. Pendapatan | | √ | Tidak |
| | f. Pengembangan Belanja | | √ | Tidak |
| | g. Kas BLU | | √ | Tidak |
| | h. Kas di Bendahara Pengeluaran | | √ | Tidak |
| | i. Kas Hibah | | √ | Tidak |
| | j. Pengesahan Hibah Langsung | | √ | Tidak |

| | | Ya | Tidak | Seharusnya |
|---|--|-----|-------|------------|
| | Rekon Internal | | | |
| 1 | Terdapat Selisih Rekon Internal | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Daftar MONSAKTI | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak | | V | Ada/Tidak |
| 2 | Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister) | | V | Ada/Tidak |
| 3 | Adakah Neraca Tidak Balance? | | V | Tidak |
| 4 | Adakah Pagu Minus (Basis SP2D) | | V | Tidak |
| 5 | Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi? | | V | Tidak |
| 6 | Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada) | | V | Tidak |
| PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL | | | | |
| | Pengecekan Saldo Neraca Percobaan | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1. | Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual | | V | Tidak |
| 2 | Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas | | V | Tidak |
| 3 | Terdapat Saldo bernilai desimal | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi) | V | | Ya |
| 2 | Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K) | V | | Ya |
| 3 | Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K) | V | | Ya |
| 4 | Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K) | V | | Ya |
| 5 | Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D) | V | | Ya |
| 6 | Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu) | V | | Ya |
| 7 | Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K) | V | | Ya |
| | | | | |
| | Akun-Akun yang tidak boleh ada | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) | | V | Ada/Tidak |
| 2 | Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari | | V | Tidak |
| 3 | Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka | | V | Tidak |
| 4 | Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain | | V | Tidak |
| 5 | Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga" | | V | Tidak |
| 6 | Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar | | V | Tidak |
| 7 | Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan) | | V | Tidak |
| 8 | Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah) | | V | Tidak |
| 9 | Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN | | V | Tidak |
| 10 | Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/19/745/772/773/774/815/816/998) | | V | Tidak |
| 11 | Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban | | V | Tidak |
| 12 | Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain) | | V | Tidak |
| 13 | Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Jika Bukan Satker BLU | Ada | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU" | | V | Tidak |
| 2 | Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU) | | V | Tidak |
| 3 | Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU) | | V | Tidak |
| 4 | Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU) | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Terkait Satker BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) | | | Ada/Tidak |
| | Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah | | | |
| 2 | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada | | | Tidak |
| | | | | |
| | Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas | Ada | Tidak | Seharusnya |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|-------------------|
| 1 | Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam | | V | Tidak |
| 2 | Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Hibah Langsung | Ada | Tidak | Seharusnya |
| | Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke | | V | Ada/Tidak |
| 1 | Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh | | V | Ada/Tidak |
| 2 | Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal) | | V | Ada/Tidak |
| 3 | Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL) | | | Ya |
| 4 | Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan? | | | Ya |
| 5 | Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ? | | | Ya |
| | Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya | | | Ada/Tidak |
| 1 | Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang | | | Ya |
| | | | | |
| | Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal | | | |
| 1 | Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI | | | |
| 2 | Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan) | | | |
| 3 | Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas? | | V | Ya/Tidak |
| 2 | Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap? | | V | Ya/Tidak |
| 3 | Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual | | | Ya |
| | | | | |
| | Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) | | V | Ya/Tidak |
| 2 | Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun | | V | Ya/Tidak |
| | Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK | | | |
| | | | | |
| | Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah | | V | Ya/Tidak |
| PENGECEKAN NERACA | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos Neraca | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya | V | | Ya |
| 2 | Saldo pada neraca bernilai wajar | V | | Ya |
| 3 | Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN | V | | Ya |
| 4 | Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening | V | | Ya |
| 5 | Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan | V | | Ya |
| 6 | Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar? | | V | Tidak |
| 7 | Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan? | | V | Ya |
| 8 | Terdapat saldo bernilai desimal | | V | Tidak |
| | | | | |
| PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LO | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015) | | V | Tidak |
| 2 | Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , | | V | Tidak |
| 3 | Terdapat kodifikasi atau uraian akun null | | V | Tidak |
| 4 | Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang | V | | Ya |
| 5 | Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan? | V | | Ya/Tidak |
| 6 | Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar | V | | Ya/Tidak |
| 7 | Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | V | Tidak |

| PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
|---|--|-----------|--------------|-------------------|
| | Pengecekan Pos-pos LPE | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" | V | | Ya |
| 2 | Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya | | V | Ya/Tidak |
| 3 | Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset". Bila ada, cek | | V | Tidak |
| 4 | Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | V | Tidak |
| | | | | |
| | Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? | | | Ya |
| | Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal | | | |
| 2 | Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar | | | Ya |
| | | | | |
| PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P) | | | | |
| | Pengecekan Pos-pos LRA/B/P | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Terdapat saldo negatif di LRAB | | V | Tidak |
| 2 | Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu) | | V | Tidak |
| 3 | Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya | | V | Tidak |
| 4 | Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada" | | V | Tidak |
| 5 | Apakah terdapat saldo bernilai desimal? | | V | Tidak |
| 6 | Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti | | V | Ya/Tidak |
| 7 | Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi) | | V | Ya |
| | | | | |
| TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN | | | | |
| | Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : | | V | Ya/Tidak |
| | - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) | | V | Ya/Tidak |
| | - Beban Penyisihan Piutang (di LO) | | V | Ya/Tidak |
| | - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang | | V | Ya/Tidak |
| 2 | Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : | | V | Ya/Tidak |
| | - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang | | V | Ya/Tidak |
| 3 | Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : | | V | Ya/Tidak |
| | - Beban Persediaan (di LO) | V | | Ya/Tidak |
| 4 | Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : | | V | Ya/Tidak |
| | - Akumulasi AT/AL (Neraca) | | V | Ya/Tidak |
| | - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) | | V | Ya/Tidak |
| 5 | Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? | | V | Ya/Tidak |
| | Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO? | | V | Ya |
| | | | | |
| | Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? | | | Ya/Tidak |
| | Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas | | | Ya |
| 2 | Apakah ada Beban Bansos ? | | | Ya/Tidak |
| | Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas | | | Ya |
| | | | | |
| | Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua | | V | Ya/Tidak |
| 2 | Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) | | | Ya/Tidak |
| | - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua | | V | Ya/Tidak |
| 3 | Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua | | V | Ya/Tidak |
| 4 | Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) | | | Ya/Tidak |
| | - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua | | V | Ya/Tidak |
| 5 | Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua | | V | Ya/Tidak |
| | | | | |
| TELAAH LK BLU | | | | |
| | LPSAL BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah nilai LPSAL sudah sesuai? | | | Ya |
| 2 | Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus? | | | Tidak |

| | | | | |
|---|---|-----------|--------------|-------------------|
| 3 | Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai? | | | Ya |
| 4 | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, | | | Ya |
| 5 | Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA | | | Ya |
| 6 | Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, | | | Ya |
| | | | | |
| | LAK BLU | Ya | Tidak | Seharusnya |
| 1 | Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan | | | Ya |
| 2 | Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK? | | | Ya |
| 3 | Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca | | | Ya |
| 4 | Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca | | | Ya |
| 5 | Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca | | | Ya |
| 6 | Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca | | | Ya |
| 7 | Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan | | | Ya |

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

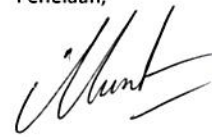
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Rizal Mutaqin, S.E., M.M.)
NIP. 197605212005021001

Jakarta, 29 Juli 2024
Penelaah,



(Andri Mardika, S.E)
NIP. 199708232020121005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 401113

Tgl Data : 26/07/24 12:24 PM
Tgl Cetak : 26/07/24 3:55 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

| URAIAN | 2024 | | | | 2023 | | | |
|---|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|
| | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % | ANGGARAN | REALISASI | REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN | % |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| a. Dana Perimbangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dana Transfer Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Bagi Hasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dana Transfer Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Dana Alokasi Khusus Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Dana Insentif Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Dana Keistimewaan DIY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d. Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dana Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Hibah Kepada Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II) | 135,015,000 | 72,957,000 | (62,058,000) | 54 | 162,500,000 | 87,449,000 | 75,051,000 | 54 |
| C. PEMBIAYAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 26 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE
196506131985031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 26/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 26/07/24 3:55 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

| NAMA PERKIRAAN | JUMLAH | | Kenaikan (Penurunan) | |
|---------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|------|
| | 2024 | 2023 | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ASET | | | | |
| ASET LANCAR | | | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0.00 |
| Kas Lainnya dan Setara Kas | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |
| JUMLAH ASET | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |
| KEWAJIBAN | | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | | |
| Utang kepada Pihak Ketiga | 600,000 | 0 | 600,000 | 0.00 |
| Uang Muka dari KPPN | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 | 0.00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 11,600,000 | 0 | 11,600,000 | |
|-------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|--|

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 26 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE
196506131985031001

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 26/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 26/07/24 3:55 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|------------|------------|------------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN PERPAJAKAN | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Penghasilan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Cukai | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pajak Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Masuk | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bea Keluar | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Perpajakan | 0 | 0 | 0 | |
| PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Sumber Daya Alam | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya | 760,000 | 850,000 | (90,000) | (10.588) |
| Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak | 760,000 | 850,000 | (90,000) | (10.588) |
| PENDAPATAN HIBAH | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Pendapatan | 760,000 | 850,000 | (90,000) | (10.588) |
| BEBAN OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pegawai | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Persediaan | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Barang dan Jasa | 11,407,000 | 7,028,000 | 4,379,000 | 62.308 |
| Beban Pemeliharaan | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Perjalanan Dinas | 61,550,000 | 84,360,000 | (22,810,000) | (27.039) |
| Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bunga | 0 | 0 | 0 | |

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 26/07/24 12:24 PM

Tgl Cetak : 26/07/24 3:55 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|---|--------------|--------------|------------------------|----------|
| Beban Subsidi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Hibah | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Bantuan Sosial | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Transfer | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Lain-Lain | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH BEBAN | 72,957,000 | 91,388,000 | (18,431,000) | (20.168) |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL | (72,197,000) | (90,538,000) | 18,341,000 | (20.258) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Pelepasan Aset Non Lancar | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | 0 | 0 | 0 | |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | 0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (72,197,000) | (90,538,000) | 18,341,000 | (20.258) |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | |
| POS LUAR BIASA | 0 | 0 | 0 | |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (72,197,000) | (90,538,000) | 18,341,000 | (20.258) |

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 26 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE
196506131985031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 26/07/24 12:21 PM

Tgl Cetak : 26/07/24 3:55 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

| URAIAN | 2024 | 2023 | KENAIKAN/ PENURUNAN | (%) |
|----------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
| EKUITAS AWAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (72,197,000) | (90,538,000) | 18,341,000 | (20.26) |
| TRANSAKSI ANTAR ENTITAS | 72,197,000 | 86,599,000 | (14,402,000) | (16.63) |
| KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS | 0 | (3,939,000) | 3,939,000 | (100) |
| EKUITAS AKHIR | 0 | (3,939,000) | 3,939,000 | (100) |

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 26 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NASRULLOH, SE

196506131985031001